



**PERBANAS
INSTITUTE**



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PENGAWASAN ATAS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

Sofyan Antonius, Ak. MM, CA. QIA, CGCAE
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT

17 Februari 2022

CURRICULUM VITAE



Nama : **Sofyan Antonius, Ak, MM, CA, QIA,
CGCAE**

Pangkat : Pembina Utama Muda / IVC

Alamat : Perw. BPKP Prov. NTT Jl. Palapa no. 21A,
Kantor Kupang Telp. (0380) 832757

Telepon : HP. 0853-54244935

Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Prov NTT

MASA PENUGASAN



Nama : **Sofyan Antonius, Ak, MM, CA, QIA, CGCAE**

Perwakilan BPKP **Provinsi Riau** (1989 – 1994)

Sekretariat Utama BPKP (DIV) (1994 – 1997)

Deputi Pengeluaran (1997 – 2000)

Tim Satgas BPPN (1998 - 1999)

Tim Satgas PLN (1999 – 2000)

Deputi Keuangan Daerah (2000 – 2005)

Kasubag Kepegawaian di Perw BPKP **Prov Kalsel** (2005 -2008)

Tata Usaha Kedeputian Akuntan Negara BPKP Pusat (2008 – 2011)

Kepala Bidang IPP di Perw BPKP **Prov Papua** (2011 – 2013)

Kepala Bidang Evaluasi Pusbin JFA (2013 – 2017)

Kepala Sub Direktorat Hankam (Juni 2017 – November 2017)

Kepala Perwakilan BPKP **Prov Sulteng** (Nov 2017 – April 2019)

Kepala Perwakilan BPKP **Prov Sulut** (April 2019 – Januari 2020)

Kepala Pusat Pembinaan JFA (Januari 2020 – Januari 2021)

Kepala Perwakilan BPKP **Prov. NTT** (Januari 2021 – sekarang)

MATERI PEMBAHASAN

01 **DANA DESA**

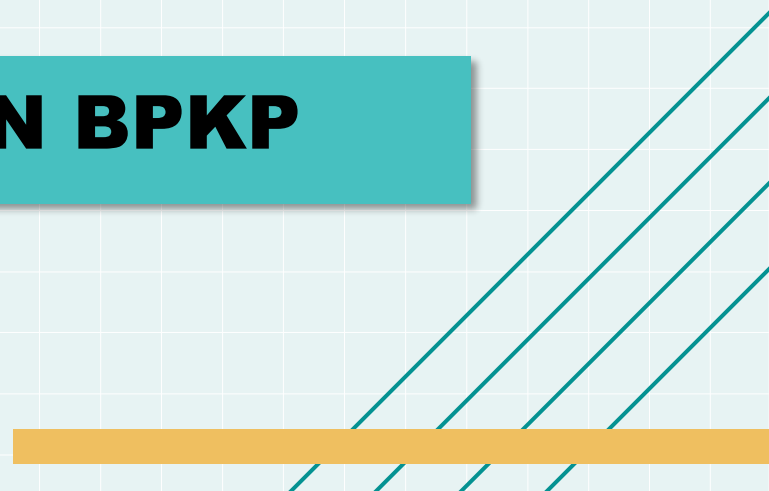
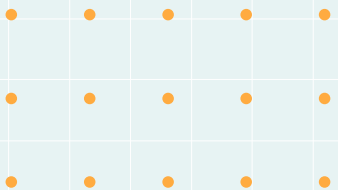
02 **ASET DESA**

03 **SISKEUDES**

04 **SISWASKEUDES**

05 **MCP**

06 **PERAN BPKP**





01

DANA DESA

Visi Pembangunan Indonesia
dalam RPJMN 2020 – 2024:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”

Misi ke-3: “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”

Agenda Pembangunan ke:

2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

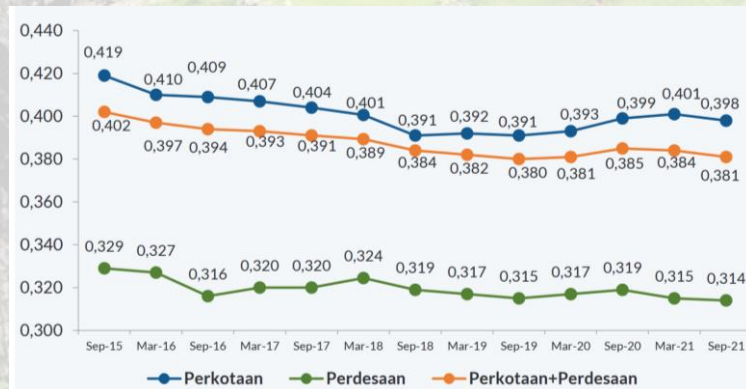
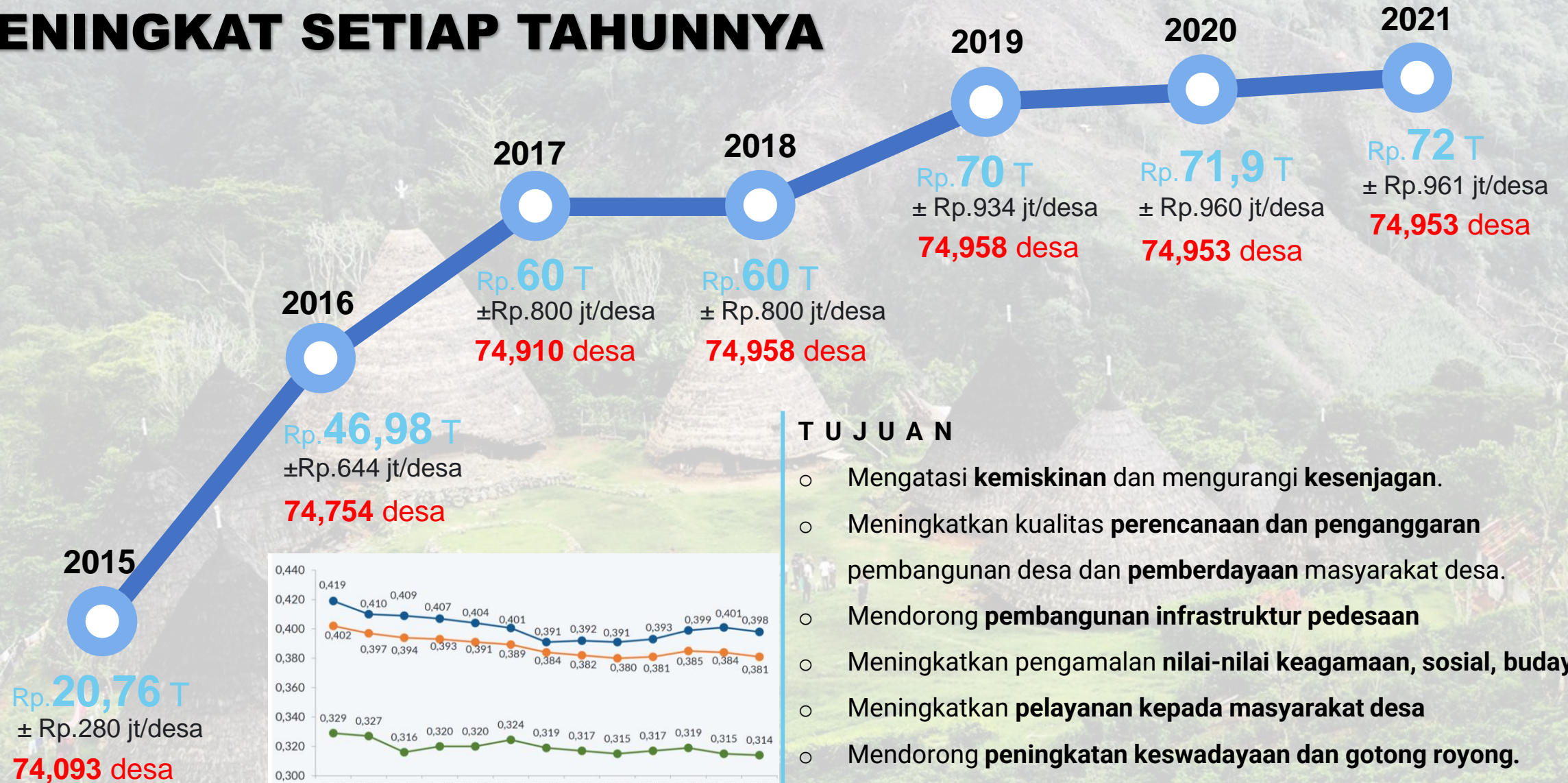
“Pemerintah telah **berkomitmen** untuk membangun Negara Indonesia yaitu dengan membangun dari **pinggiran**, membangun dari **perbatasan** dan membangun dari **desa**.”

- Joko Widodo -
Presiden Republik Indonesia

Peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan
Peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa
20 Desember 2021



ALOKASI DANA DESA MENINGKAT SETIAP TAHUNNYA



T U J U A N

- Mengatasi **kemiskinan** dan mengurangi **kesenjangan**.
- Meningkatkan kualitas **perencanaan dan penganggaran** pembangunan desa dan **pemberdayaan** masyarakat desa.
- Mendorong **pembangunan infrastruktur pedesaan**
- Meningkatkan pengamalan **nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya**
- Meningkatkan **pelayanan kepada masyarakat desa**
- Mendorong **peningkatan keswadayaan dan gotong royong**.
- Meningkatkan **pedapatan desa** melalui **BUMDes**.

KASUS PENYALAHGUNAAN DANA DESA



Kompas.com / Regional

Buron Sejak 2021, Mantan Kades Cihawuk yang Korupsi Dana Desa Rp 800 Juta Ditangkap

Kompas.com - 17/01/2022, 17:50 WIB

BAGIKAN:



Korupsi Dana Desa Rp 689 Juta, 2 Perangkat di Probolinggo Ditahan

M Rofiq - detikJatim

Selasa, 08 Feb 2022 21:37 WIB

Korupsi Dana Desa Rp609 Juta, Mantan Kades Ditangkap

Avirista Midaada, Okezone · Rabu 23 September 2020 01:29 WIB



Tersangka Korupsi Dana Desa, 2 Perangkat Desa Trenggalek Ditahan

Tersangka Korupsi Dana Desa, 2 Perangkat Desa Trenggalek Ditahan

Labuhanbatu, Sumatera Utara



KADES KORUPSI DANA DESA

Tersangka Tidak Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan Volume Belanja

Korupsi Dana Desa

Itontont · 11 Mar 2021

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, sektor yang paling rawan dikorupsi pada semester I 2021 adalah anggaran Dana Desa.

Terdapat 55 kasus korupsi yang berkaitan dengan anggaran desa dan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 35,7 miliar.

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022

(sesuai Permendes PDTT 7/2021)

Pemulihan Ekonomi

1. Penanggulangan kemiskinan
2. BUMDes
3. Pengembangan usaha produktif

Program Prioritas

1. Kemitraan
2. Pengembangan desa wisata
3. Ketahanan pangan
4. Pencegahan stunting
5. Desa inklusif

Mitigasi & Penanganan Bencana

1. Bencana alam & non alam
2. BLTDD

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

(sesuai Perpres 104/2021)



BLT Dana Desa

Alokasi minimal 40%



Ketahanan Pangan dan Hewani

Alokasi minimal 20%



Penanganan Covid-19

Alokasi minimal 8%



Sektor Prioritas Lainnya

Sesuai Permendes PDPTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022



BLT yang diterima sebesar Rp300.000/bulan/KPM

Kriteria penerima BLT DD (sesuai PMK 190/OMK.07/2021):

- ✓ Keluarga miskin berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
- ✓ Kehilangan mata pencaharian
- ✓ Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- ✓ Keluarga miskin penerima JPS lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN
- ✓ Keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan
- ✓ Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia



antara lain:

1. Pembangunan melalui pola **PKTD**
2. Kegiatan pemberdayaan
3. Belanja operasional
4. Penambahan aset
5. Penyertaan Modal **BUMDes**

Sektor Prioritas Lainnya

- Diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- Anggaran upah kerja **minimal 50%** dari total anggaran per kegiatan;
- Kriteria pekerja -- penganggur, setengah penganggur, PEKKA, keluarga miskin, masyarakat marjinal;
- Diutamakan melalui **swakelola**.



BUMDes

Tantangan BUMDes:

1. Pembenahan struktur organisasi
2. Kualitas SDM
3. Perbaikan system
4. Pengembangan Potensi
5. Promosi



This Photo by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

BUMDes Iyya Teki Desa Tebara Kec. Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat Desa Percontohan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 dalam kategori Pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa, dan Inovasi Desa

BUMDes Au Wula Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur masuk nominasi 10 besar BUMDes terbaik nasional 2020. <https://katadesa.id/index.php/daya-des/potensi-des/184-kisah-desa-detusoko-barat-masuk-10-bumdes-terbaik>

LOMBOK KERITING 8K	SEREH 5K	TERUNG 8K	WORTEL 6K
KENTANG 8K	PUCUK LABU 6K		

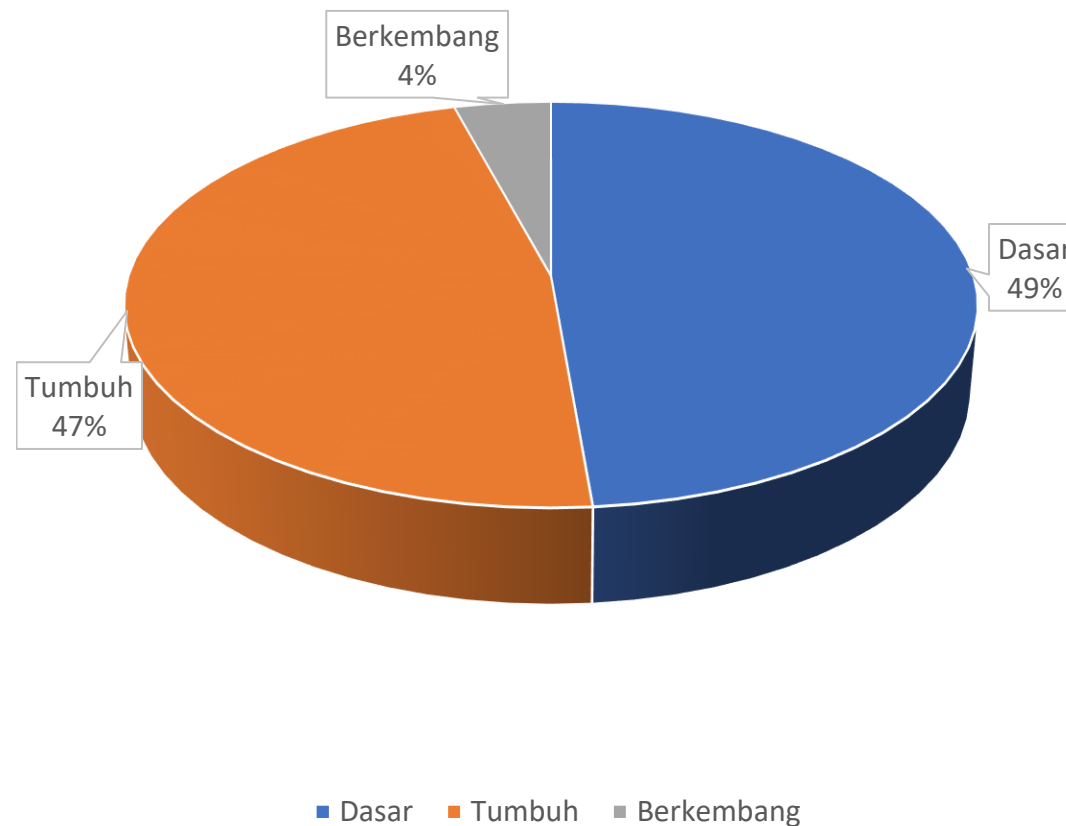
DAPUR KITA
BUMDES AU WULA
DESA DETUSOKO BARAT
MENYEDIAKAN ANEKA SAYURAN

Desa Detusoko Barat melalui Bumdes Au Wula, bekerjasama dengan KAE Tanggap Covid 19; memberdayakan para Petani Holtikultura dengan menyediakan kebutuhan harian Ibu-Ibu Rumah Tangga.

Data BUMDes di NTT

NO.	KABUPATEN	JUMLAH DESA	JUMLAH BUMDes
1	KUPANG	160	158
2	TIMOR TENGAH SELATAN	266	266
3	TIMOR TENGAH UTARA	160	160
4	BELU	69	69
5	ALOR	158	157
6	FLORES TIMUR	229	229
7	SIKKA	147	42
8	ENDE	255	256
9	NGADA	135	135
10	MANGGARAI	145	145
11	SUMBA TIMUR	140	140
12	SUMBA BARAT	63	63
13	LEMBATA	144	144
14	ROTE NDAO	112	112
15	MANGGARAI BARAT	164	164
16	NAGEKEO	97	97
17	SUMBA TENGAH	65	65
18	SUMBA BARAT DAYA	173	173
19	MANGGARAI TIMUR	159	159
20	SABU RAIJUA	58	58
21	MALAKA	127	127
	JUMLAH	3.026	2.919

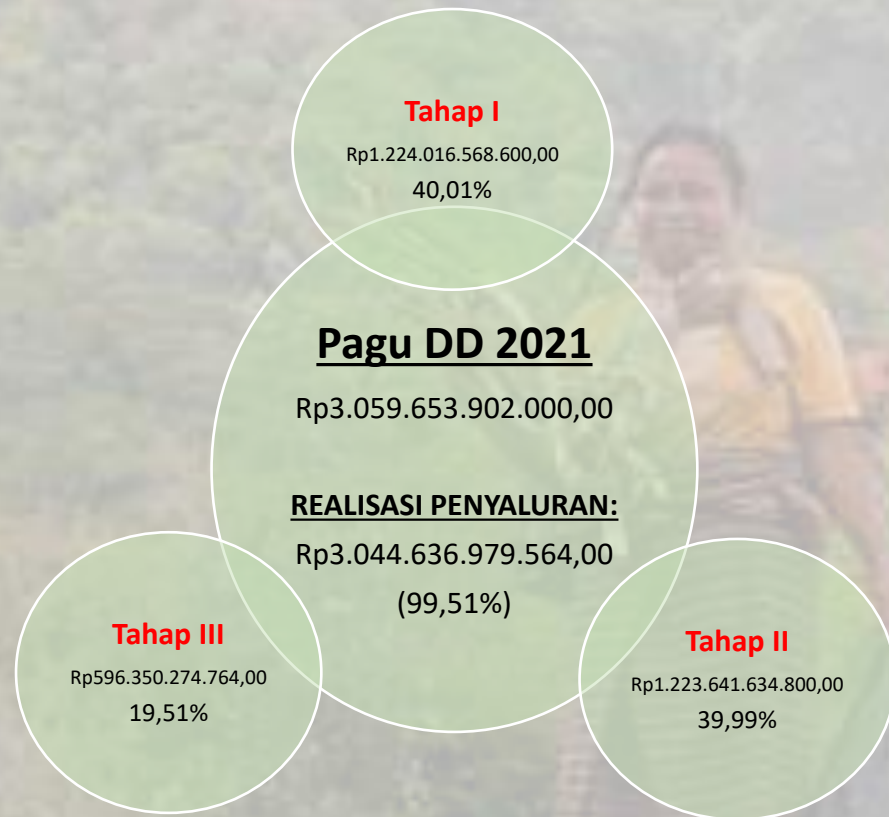
BUMDes aktif: 1.289 BUMDes



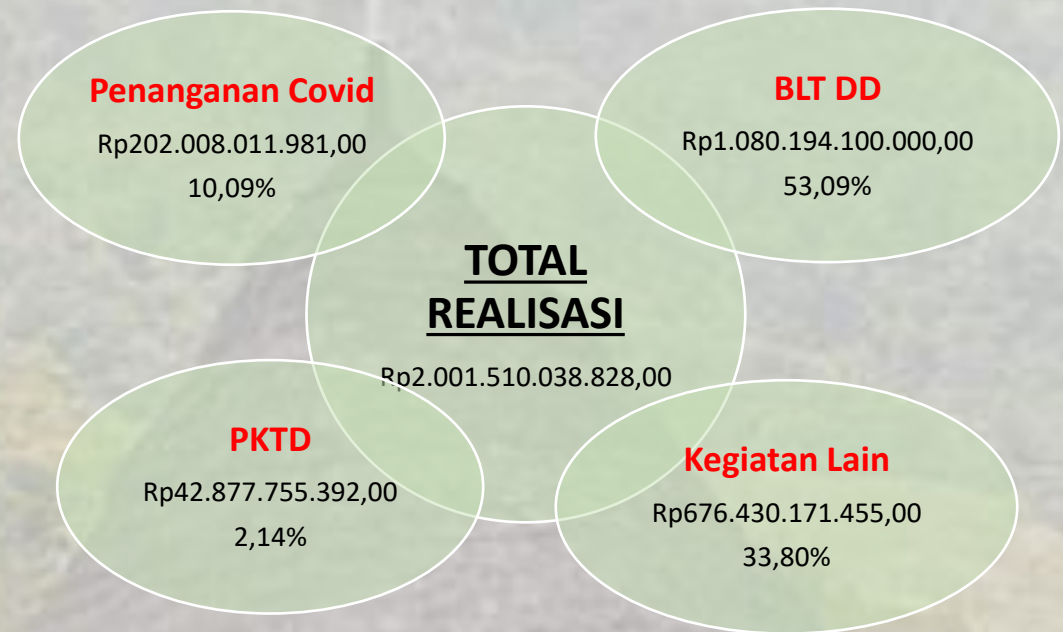
Data Tahun 2020

Gambaran Umum Dana Desa di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021

REALISASI TRANSFER DD TA 2021



REALISASI PENGGUNAAN DD TA 2021



RISIKO FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA



- Risiko kolusi dalam penentuan besaran DD;
- Risiko Manipulasi data untuk memenuhi kriteria besaran nilai alokasi DD

• PENGALOKASIAN

- Risiko Penggunaan utk Keperluan Pribadi
- Risiko Kegiatan/Pengadaan Fiktif
- Risiko Pengadaan tidak sesuai ketentuan, rencana, volume, dan spesifikasi
- Risiko Mark Up harga Pengadaan
- Risiko Kegiatan tidak sesuai Prioritas
- Risiko Hasil Pengadaan tidak bermanfaat

• PENGGUNAAN

- Risiko Kolusi dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan

• PEMANTAUAN

• PENETAPAN

- Risiko kolusi dalam penetapan Desa yang menerima DD
- Risiko Manipulasi dalam pemenuhan persyaratan Pembentukan Desa Baru utk mendapatkan DD

• PENYALURAN

- Risiko praktek pemotongan DD yang disalurkan oleh oknum Pemkab/Kota
- Risiko dana disalurkan sebelum terpenuhi persyaratan.

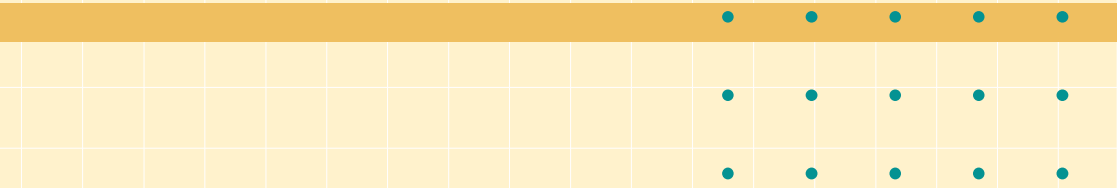
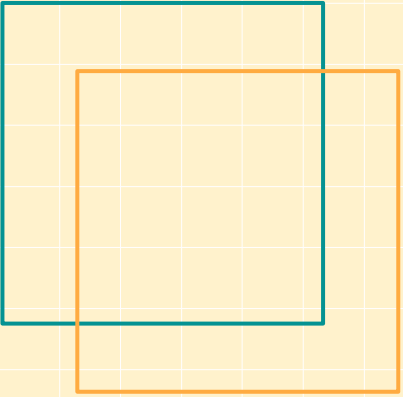
• PELAPORAN

- Risiko Laporan penggunaan tidak sesuai dengan realisasi
- Risiko Kolusi dalam pelaporan DD

PENYEBAB

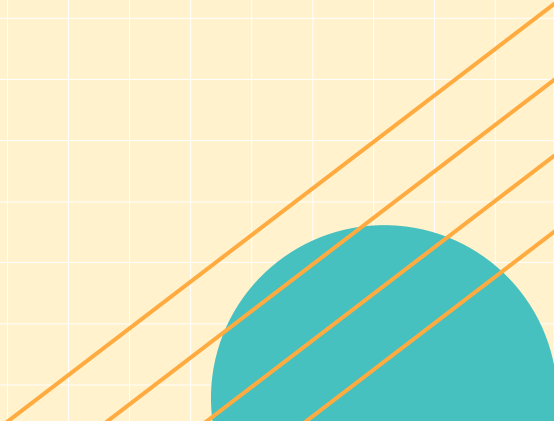
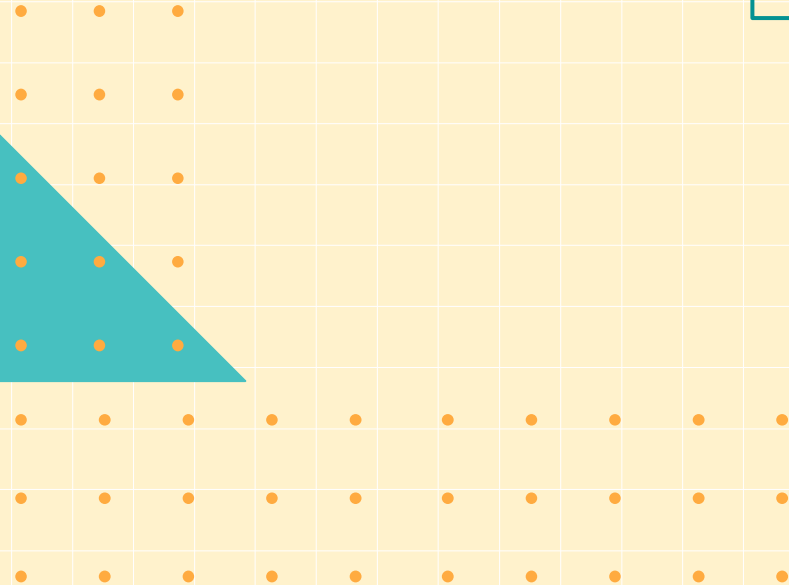


Rendahnya integritas, lemahnya SDM dalam menjalankan tata kelola dan belum terbangunnya kesadaran anti korupsi menjadi penyebab terjadinya penyimpangan penggunaan DD/ADD



02

ASET DESA



JENIS ASET DESA



Kekayaan Asli Desa

Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang



Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa



Hasil kerja sama desa



Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis

Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah



PENGELOLAAN ASET

Asas Pengelolaan Aset Desa
(Permendagri 1 tahun 2016 ttg
Pengelolaan Aset Desa)

- Asas Fungsional
- Asas Kepastian Hukum
- Asas Transparansi Dan Keterbukaan,
- Asas Efisiensi,
- Asas Akuntabilitas
- Asas Kepastian Nilai.

Sampai dengan saat ini di NTT hanya ada 1 pemda yang telah menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai turunan dari Permendagri 1 Tahun 2016.

Berikut contoh aset desa yang belum dan sudah memperhatikan pengamanan hukum maupun fisiknya:



Contoh pengadaan aset yang tidak memperhatikan asas fungsional dan efisiensi. Aset berupa handphone yang telah lama dibeli tetap terbungkus dan tidak dimanfaatkan.



Aset berupa laptop belum diberi label inventarisasi (risiko hilang)



Contoh bentuk pengamanan hukum dan fisik berupa sertifikat

PERMASALAHAN ASET DESA



Belum ada pedoman pengelolaan aset desa



Belum menyusun laporan monitoring aset desa



Belum menerbitkan laporan pembinaan dan/atau sosialisasi pengelolaan aset desa



Desa belum melakukan inventarisasi aset desa



Aset Desa yang ada belum dilakukan pengamanan fisik



Aset Desa yang ada belum dilakukan pengamanan hukum



03

SISKEUDES

Histori Pengembangan Aplikasi Siskeudes



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 900/6271/SJ
NOMOR : MoU-16/K/D/4/2015

TENTANG
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Buka Rakornas APIP, Presiden Tegaskan Pentingnya Implementasi Siskeudes

Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas PIP) Tahun 2017 merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tahun ini Rakornas PIP dilaksanakan pada Kamis, 18 Mei 2017 di Aula Gandhi BPKP Pusat sebagai puncak acara peringatan HUT 34 BPKP.



Peserta rakornas adalah Inspektur Jenderal Kementerian, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota. Selain Pimpinan APIP sebanyak 350 orang dan perwakilan dari desa terpilih sebanyak 30 orang. Selain itu, hadir pula Ketua BPK, Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan KPK, Kepala LPNK, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai undangan.

Melalui rakornas ini, BPKP bersama APIP lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan

koordinasi dan sinergi di antara APIP pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mendukung kebijakan penguatan desa.



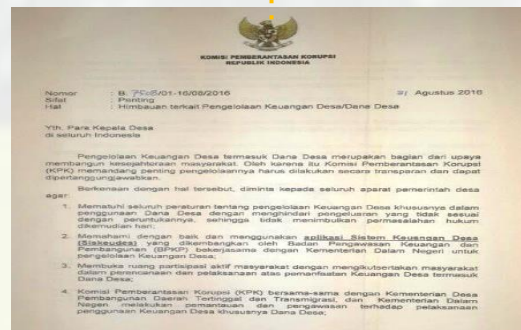
**MoU Kemendagri;
SE Kemendagri
(2015)**

**Surat Ketua KPK
(2016)**

**Arahan Presiden pada
Rakornaswasin (2017)**

**SK Mendagri Tim
Bersama Siskeudes;
Launching Aplikasi
(2018)**

**Interkoneksi
Siskeudes dan
OM-SPAN (2019)**



Mengapa SISKEUDES dibutuhkan?



Dana yang dikelola Desa semakin meningkat



Akuntabilitas keuangan Desa



Keterbatasan SDM Pengelola Keuangan Desa



Kompleksitas transaksi keuangan desa



Permintaan Laporan Keuangan Desa dari K/L

MANFAAT SISKEUDES



Pemerintah Pusat

- Interkoneksi dengan OM-SPAN untuk memantau data capaian output dan penggunaan Dana Desa;
- Sebagai bahan input Aplikasi Siped (Kemendes PDTT);
- Sebagai bahan konsolidasi data nasional (sedang dikembangkan).



Pemerintah Kab/Kota

- Sebagai *feeder* Input OM-SPAN (syarat pencairan Dana Desa) yg cepat dan akurat;
- Memantau realisasi pelaksanaan APBDesa seluruh desa;
- Database Siskeudes sebagai input Aplikasi Siswaskeudes.



Pemerintah Desa

Mempermudah tata kelola keuangan Desa, Data Akurat, Proses cepat.

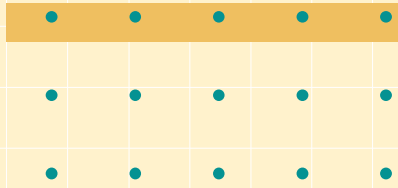
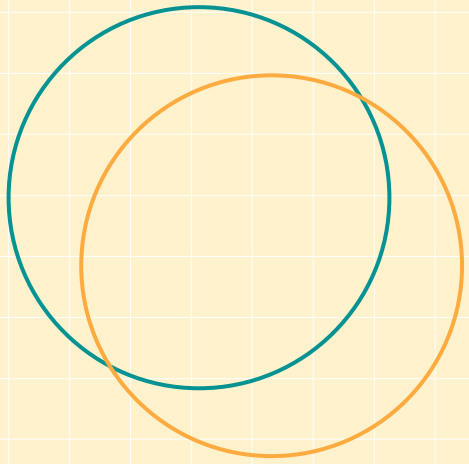
STEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)



The screenshot shows a 'Login User' window titled 'AUTHENTIKASI USER'. It contains three input fields: 'User ID', 'Password', and 'Tahun Anggaran' (with '2018' entered). At the bottom, there are 'OK' and 'Batal' buttons.

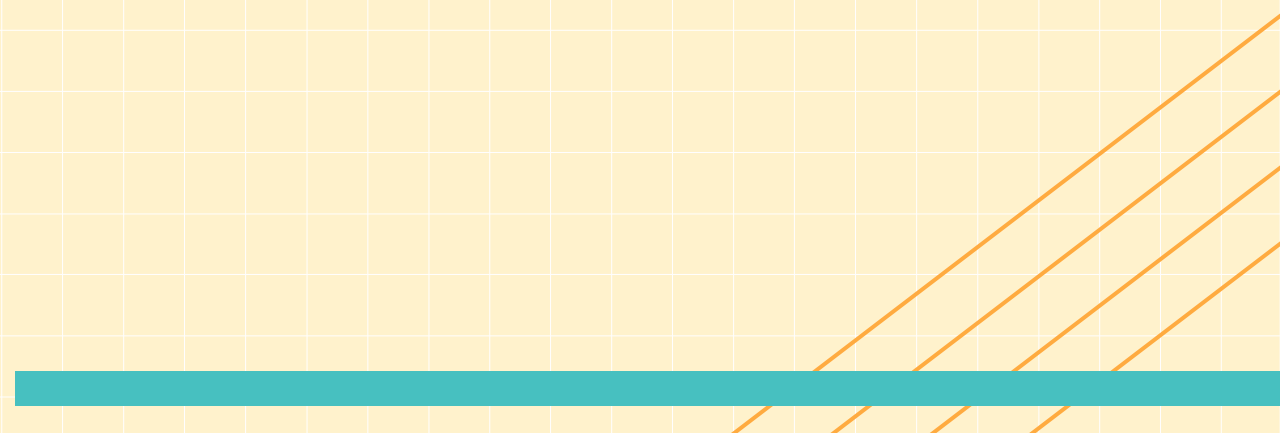
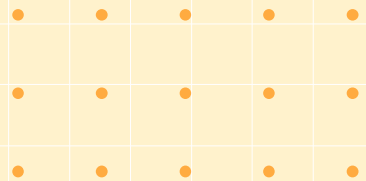
Output Aplikasi SISKEUDES

- RPJMDes & RKPDes
- Perdes APBDes
- Perkades Penjabaran APBDes
- Buku/dokumen penatausahaan keuangan desa (BKU, Bank, Panjar, SPP, dll)
- Laporan Realisasi APBDes
- Laporan realisasi per Sumber Dana
- Laporan kompilasi di tingkat Pemda



04

SISWASKEUDE

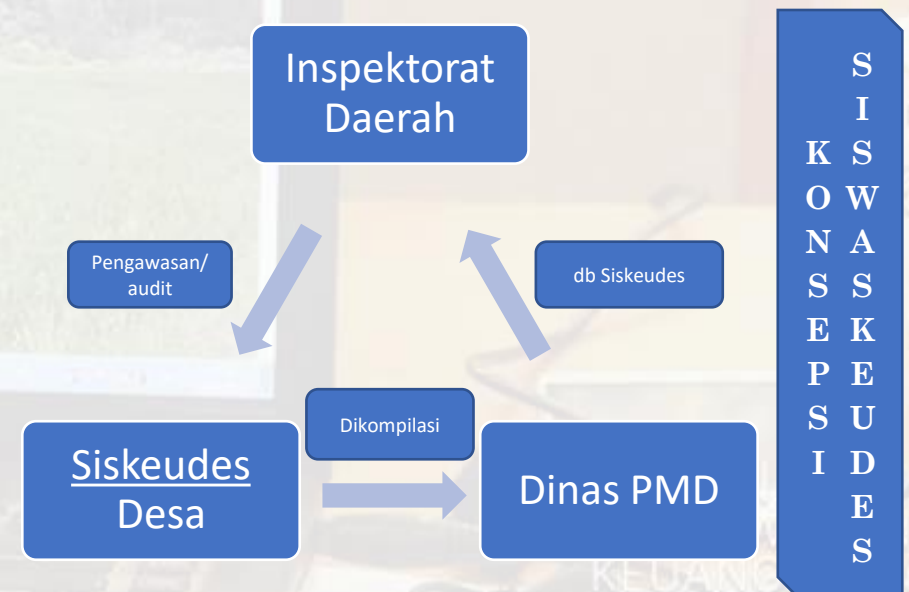


SISWASKEUDES

merupakan aplikasi yang digunakan oleh APIP sebagai *tools* pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan berbasis risiko dan teknik audit berbantuan komputer. (Permendagri 73/2020)

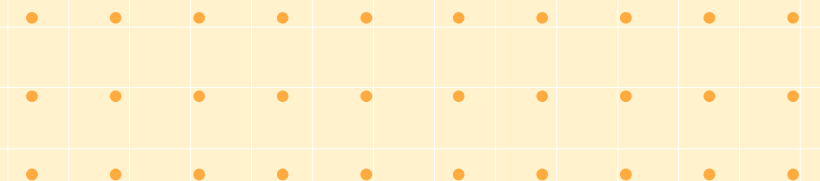
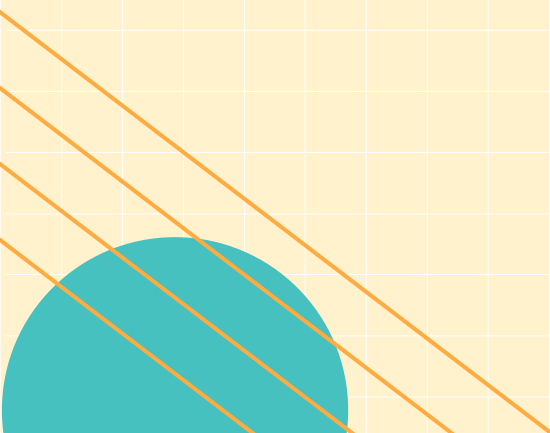
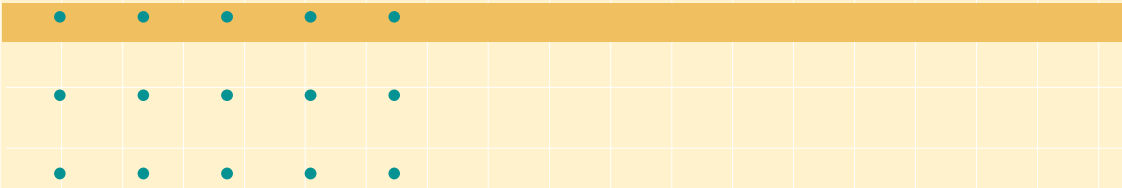
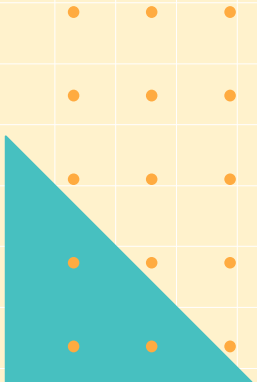
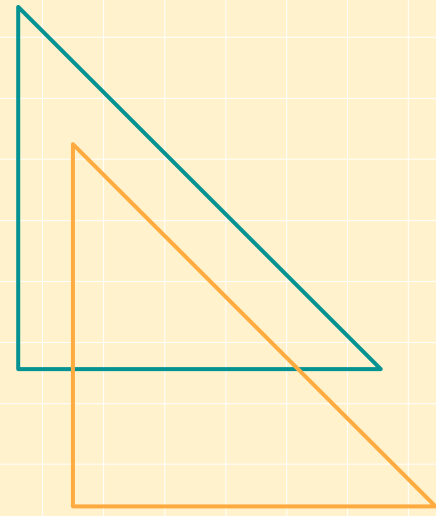
MENGAPA SISWASKEUDES?

- Regulasi keuangan desa bahwa APIP Pemda melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- Kondisi desa yang beragam;
- Keterbatasan SDM APIP;
- Semakin besarnya dana yang dikelola desa dan pengelolaannya telah menggunakan aplikasi Siskeudes;
- Konsep manajemen risiko dan CACM;
- Belum adanya modul dan aplikasi untuk membantu APIP melakukan pengawasan keuangan desa.

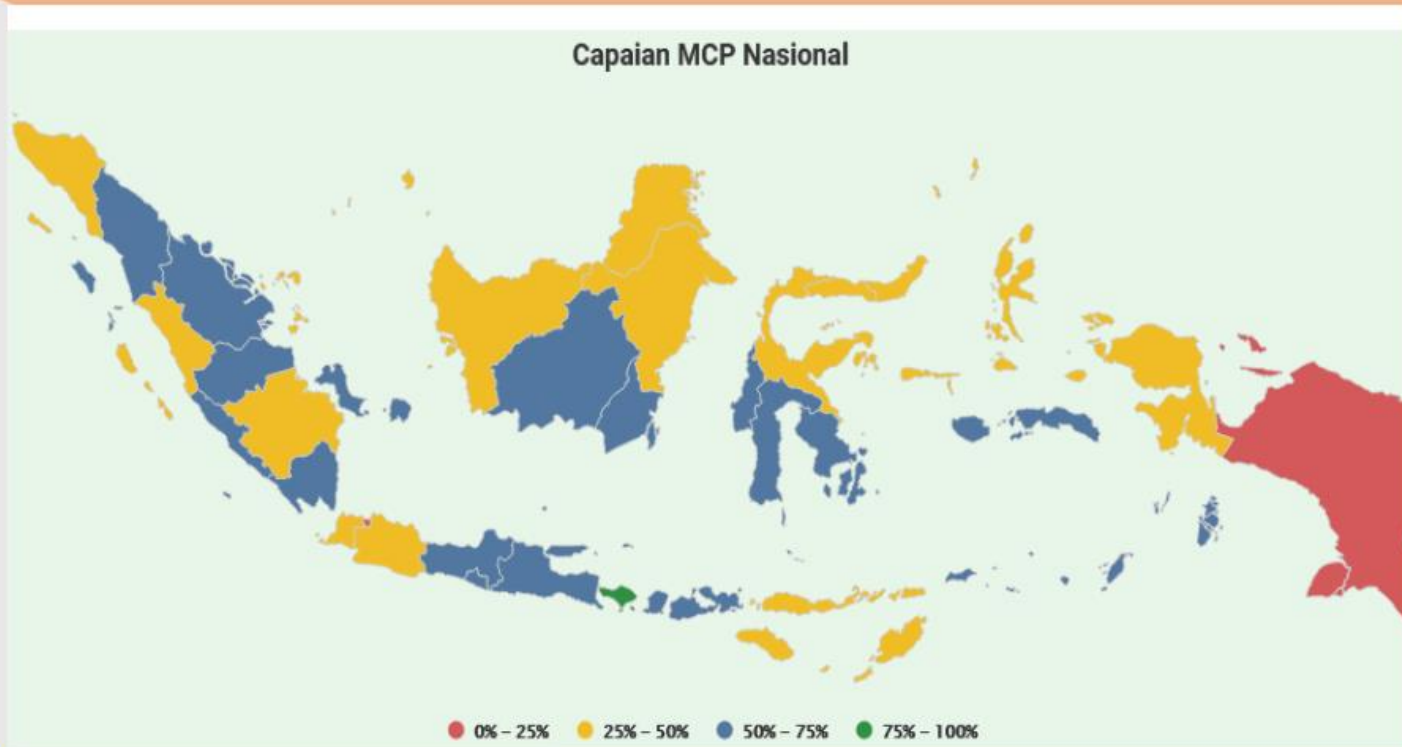


05

MCP



MONITORING CENTER FOR PREVENTION



MCP

2018

58%

2019

69%

2020

64%

2021

23%*

Desa

69%

2018

59%

2019










59.7%

2020

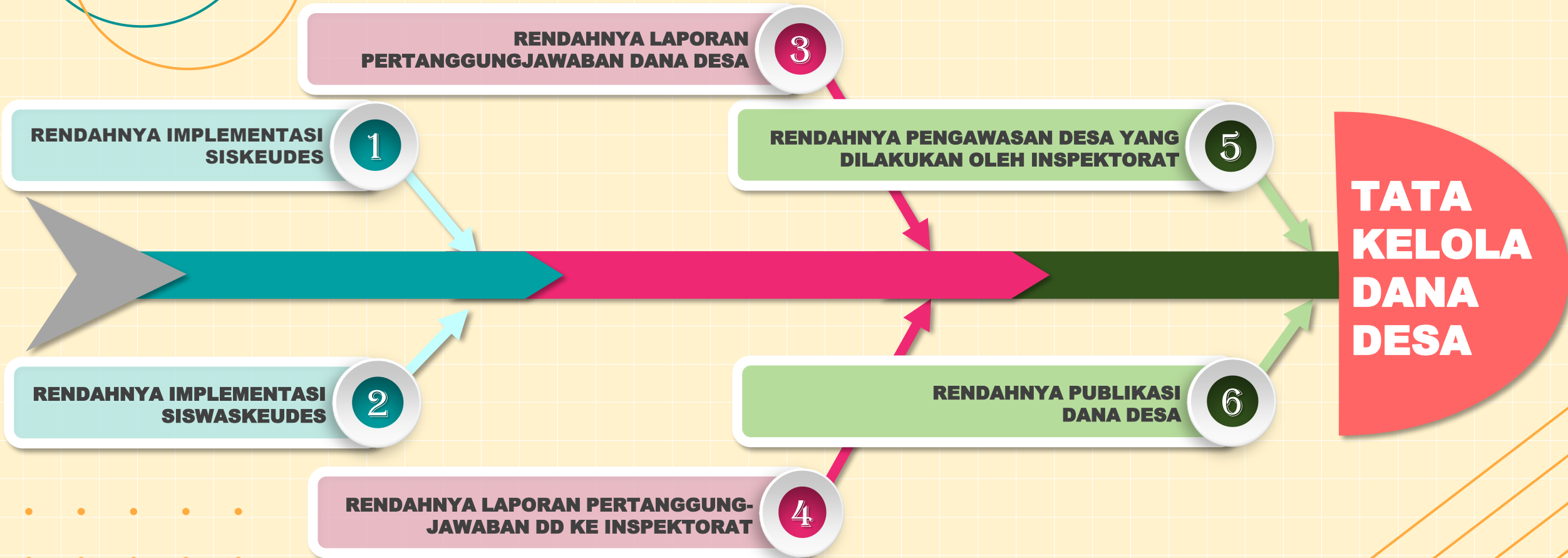
21.5%*

2021

CAPAIAN MCP WILAYAH NTT TAHUN 2020

SKOR RATA-RATA		32,98
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD		38,21
PENGADAAN BARANG DAN JASA		29,33
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		28,36
APIP		38,63
MANAJEMEN ASN		41,67
OPTIMALISASI PAJAK DAERAH		25,90
MANAJEMEN ASET DAERAH		27,61
TATA KELOLA ASET DESA		19,30

PERMASALAHAN TATA KELOLA DANA DESA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



06

PERAN BPKP

PERAN BPKP SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH



Pencegahan dan Pemberantasan **Korupsi**



Meningkatkan **Akuntabilitas** Keuangan Negara/Daerah



Membina Penyelenggaraan **Sistem** Pengendalian Intern Pemerintah



Quality Assurance Dalam **Reformasi** Birokrasi



Mengawal **Program** Strategis Pemerintah

PERAN BPKP

DALAM PENGAWASAN DANA DESA

PENJAMINAN

1. Evaluasi/monitoring kesesuaian Penggunaan DD dengan prioritas yang ditetapkan;
2. Evaluasi/monitoring BLT DD;
3. Evaluasi/monitoring PKTD;
4. Evaluasi/monitoring Penanganan Covid-19 di Desa;
5. Evaluasi/monitoring Tata Kelola Aset Desa;
6. Monitoring BLT Kemiskinan Ekstrem di Desa.

KONSULTANSI

**Bimtek/Sosialisasi/
Pendampingan/
Konsultansi Aplikasi
Siskeudes dan
Siswaskeudes**

Terima Kasih



**PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Palapa Nomor 21A Kota Kupang Kotak Pos 85111

Telp. (0380) 833062, 829142, 823321, Fax (0380) 832757

Web: <http://www.bpkp.go.id>